

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan pertolongan diyakini telah ada sejak masa masyarakat primitive sekalipun dalam bentuk tolong-menolong untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggotanya. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisir dan sistematis.

Kesejahteraan sosial menekankan pada suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto, 2014:1). Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014:9) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial suatu sistem yang dirancang untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing sehingga dapat mencapai standar hidup yang memadai melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan

oleh institusi pemerintah maupun swasta. Definisi lain Kesejahteraan Sosial menurut Suharto (2010:3) adalah sebagai berikut:

“Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga-pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.”

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan dalam berkontribusi dalam pemecahan masalah sosial yang ada pada masyarakat dan juga turut meningkatkan kualitas hidup pada individu secara terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta.

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan Sosial pada intinya merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta dalam membantu individu, kelompok dan masyarakat memecahkan permasalahannya yang dimiliki. Dengan mengembangkan kemampuan atau keterampilan dan sadar akan potensi-potensi yang ada dapat membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehingga dapat menuju pada peningkatan kehidupan yang lebih baik atau bisa dikatakan sejahtera.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin (2014:10) mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Menurut Schneiderman (1972) dalam Fahrudin (2014:10) terdapat tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Pemeliharaan Sistem**
Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi, makna, dan tujuan hidup. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan.
- 2) **Pengawasan Sistem**
Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (*self-control*) dengan jalan mengilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya.
- 3) **Perubahan Sistem**
Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Friedlander & Apte (1982) dalam Fahrudin (2014:12) menyebutkan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yaitu:

- 1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- 2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
- 3) Fungsi Pengembangan (*Development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- 4) Fungsi Penunjang (*Supportive*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.4 Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

Secara substansi bidang usaha atau pelayanan sosial atau juga disebut bidang usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial, terdiri dari berbagai cakupan yang

saling terkait erat satu dengan lainnya. Menurut Fahrudin (2014:17) bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial antara lain:

- 1) Kesejahteraan anak dan keluarga,
- 2) Kesejahteraan remaja dan generasi muda,
- 3) Kesejahteraan orang lanjut usia,
- 4) Pelayanan kesejahteraan sosial umum (*public social welfare services*),
- 5) Pelayanan rekreasional,
- 6) Pelayanan sosial koreksional,
- 7) Pelayanan kesehatan mental,
- 8) Pelayanan sosial medis,
- 9) Pelayanan sosial bagi penyandang cacat,
- 10) Pelayanan sosial bagi wanita,
- 11) Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

2.2 Tinjauan Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang terencana dalam bentuk pertolongan terhadap individu, kelompok dan masyarakat untuk membantu meningkatkan kehidupan yang lebih berkualitas dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2009:1) definisi pekerjaan sosial, yaitu:

Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas

mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah, sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sampai kembali pada kondisi yang kondusif seperti yang diharapkan. Definisi pekerjaan sosial menurut *International Federation of Social Workers* (IFSW) yang dibenarkan oleh NASW dalam Fahrudin (2014:61), yaitu:

The social work profession promotes problem solving in human relationships, social change, empowerment and liberation of people, and the enhancement of society. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human right and social justice are fundamental to social work

Definisi diatas dapat diartikan bahwa profesi pekerjaan sosial meningkatkan kesejahteraan dengan membantu pemecahan masalah dalam berbagai relasi seperti relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat dengan melibatkan interaksi orang tersebut dengan lingkungannya.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial berperan dalam membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Tujuan praktis pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2014:66), yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (dalam Zastrow,2008).

Berdasarkan penjelasan diatas pekerjaan sosial mempunyai tujuan untuk membantu memecahkan masalah dengan memberikan akses terhadap pelayanan-pelayanan yang ada untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Selain tujuan tersebut, Zastrow (2008) dalam Fahrudin (2014:67) menambahkan empat tujuan yang dikemukakan oleh CSWE, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Pekerjaan sosial memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh dengan mengembalikan keberfungsian sosial. Dengan memberikan akses pelayanan terhadap individu, kelompok dan masyarakat dapat membantu mereka dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Praktik pekerjaan sosial ini dilakukan sesuai dengan kemampuan juga strategi yang telah dipahami oleh pekerjaan sosial tersebut.

2.2.3 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang bertujuan membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Dalam menjalankan proses praktik pertolongannya, pekerjaan sosial menggunakan beberapa metode sesuai dengan masalah yang harus dipecahkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Fahrudin (2014:71) bahwa secara tradisional pekerjaan sosial mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu (1) Metode Pokok: *Social Case Work*, *Social Group Work*, dan *Community Organization/Community Development*. (2) Metode Pembantu: *Social Work Administration*, *Social Action*, dan *Social Work Reseach*. Tetapi pandangan ini telah lama ditinggalkan, kemudian digunakan dua pendekatan, yaitu praktik langsung (*direct practice*) dan praktik tidak langsung (*indirect practice*).

Social Case Work, atau metode pertolongan pada individu yang ditujukan untuk membantu individu dalam memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosialnya. Sehingga individu atau keluarga dapat berperan sesuai status yang mereka miliki dalam lingkungan sosialnya.

Social Group Work, atau metode pertolongan terhadap kelompok yang ditujukan dalam upaya intervensi pada kelompok kecil. Kelompok kecil ini dapat diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini dimana mereka dengan sadar merupakan anggota

dalam kelompok yang saling terkait dan saling ketergantungan, serta memiliki keinginan untuk mencapai tujuan sama yang telah disepakati. Dengan metode ini digunakan untuk membantu kelompok dalam meningkatkan keberfungsian sosial setiap anggotanya.

Community Organization/Community Development, sasaran utama metode ini dalam praktiknya yaitu level komunitas atau masyarakat yang lebih luas. Metode ini sering dikenal dengan metode pengembangan masyarakat. Praktik ini berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan keberfungsian pada suatu masyarakat sehingga terciptakan kehidupan yang lebih baik.

2.3 Tinjauan Usaha Kesejahteraan Sosial

2.3.1 Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha Kesejahteraan Sosial atau social welfare services pada umumnya hanya disebut sebagai pelayanan sosial atau social services yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga atau instansi lainnya secara langsung maupun tidak langsung kepada individu, kelompok atau masyarakat yang mengalami permasalahan. Definisi Usaha Kesejahteraan Sosial menurut Friedlander yang dikutip oleh Fahrudin (2014:15), yaitu:

Kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.

Usaha kesejahteraan sosial ini ditunjukkan untuk individu, kelompok, dan masyarakat dengan maksud untuk mencegah atau menangani permasalahan-

permasalahan sosial yang mereka hadapi melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga, atau instansi lainnya dalam memberikan pemeliharaan sumber daya manusia sehingga terciptanya keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan setiap peranannya. Dalam UU No.6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “Usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Sementara dalam UU No. 11 Tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2.3.2 Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial biasanya berbentuk pada suatu kegiatan-kegiatan terorganisir yang terutama dan berhubungan langsung dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan pada setiap individu untuk dalam menyelesaikan masalahnya. Tujuan usaha kesejahteraan sosial menurut Suharto (2014:4) yaitu:

1. Peningkatan standar hidup, dimana meningkatkan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial untuk kelompok-kelompok

masyarakat yang kurang beruntung atau masyarakat yang sangat rentan yang memerlukan perlindungan.

2. Peningkatan keberdayaan, dimana keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat manusia.
3. Penyempurnaan kebebasan, dimana kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Tujuan usaha kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, peningkatan keberdayaan masyarakat, dan penyempurnaan kebebasan. Masyarakat yang sejahtera mempunyai standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak dapat dilihat dari terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kehidupan. Standar hidup yang layak berarti keberdayaan seseorang juga dikatakan baik. Keberdayaan seseorang ditunjang oleh kebebasan seseorang untuk menjalani pilihan-pilihan dan kesempatannya bahkan kemampuannya untuk menjalani kehidupan.

2.4 Tinjauan Tentang Pemberdayaan

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan agar objek dapat berdaya atau memiliki kekuatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama pada kelompok yang rentan atau lemah dan

kurang berfungsi secara sosial. Pemberdayaan membantu orang sehingga dapat berpartisipasi dengan menekankan bahwa mereka memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Definisi Pemberdayaan menurut Suharto (2010:58), yaitu:

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut definisi diatas pemberdayaan adalah proses dimana seseorang memiliki kekuatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi kehidupannya, dalam bentuk memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup sehingga mereka dapat meningkatkan kehidupan dirinya dan orang lain disekitarnya.

Peran perempuan sangat besar dalam kehidupan baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Banyak kebutuhan manusia ditentukan oleh perempuan, demikian pula penyelesaian masalah hidup sangat tergantung pada peran perempuan. Dalam hal ini dilakukan pemberdayaan perempuan sebagai bentuk upaya agar perempuan dapat memperoleh akses dan control terhadap dirinya sehingga mereka dapat mengatur diri dan meningkatkan percaya diri serta mampu berperan dalam memecahkan masalah. Pemberdayaan perempuan dalam (Widiastuti Novi, 2017) menyatakan: “Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi,

politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri”.

2.4.2 Prinsip Pemberdayaan

Prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Dubois dan Miley dalam Huraerah (2011:107):

- a. Membangun relasi pertolongan yang: (1) memfleksikan respon empati: (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self determination*), (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien (*client partnership*).
- b. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu: (3) berfokus pada klien: (4) menjaga kerahasiaan klien.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien: (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar: (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (1) ketantan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembangan professional, riset dan perumusan kebijakan (3) penerjemahan kesulitan kesulitan pribadi ke

dalam isu-isu publik: (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan (Suharto, 2005:68).

2.4.3 Strategi Pemberdayaan

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau mantra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro (Suharto, 2005:66-67):

- a. Aras Mikro, Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro, Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang

klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.4.4 Tingkatan Pemberdayaan

Sudah saatnya paradigma pembangunan yang selalu menempatkan pemerintahan sebagai pemain utama. Kekuasaan sejatinya dikembalikan kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan. Sebuah proses seharusnya dilakukan untuk meningkatkan drajat keberdayaan masyarakat sampai kepada tingkat keberdayaan masyarakat yang optimal.

Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti (2002) dalam Huraerah (2011) dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs)
- b. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- c. Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.
- d. Tingkat keberdayaan keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

- e. Tingkat keberdayaan yang kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya Tingkat kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

2.5 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Keluarga

2.5.1 Konsep Tentang Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan sosial memiliki peranan untuk membantu kelompok-kelompok yang kurang beruntung, salah satunya yaitu keluarga yang rentan dan miskin. Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan pelayanan yang dapat membantu setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat itu sendiri.

Pelayanan kesejahteraan sosial ini dapat membantu keluarga rentan dan miskin mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga akan tercapainya keluarga yang sejahtera. Definisi kesejahteraan keluarga menurut BKKBN (2002) dalam Gunawan Edi & Rusdiyanto (2019:186) yaitu:

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhinya semua kebutuhan : fisik material, mental spiritual dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Definisi diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan keluarga terbentuk jika keluarga dapat memenuhi kebutuhannya yang berupa kebutuhan fisik material,

mental spiritual dan sosial yang memungkinkan anggota keluarganya dapat menyesuaikan pada kehidupan lingkungannya dan dapat bertumbuh kembang juga memperoleh perlindungan. Selain itu, definisi kesejahteraan keluarga menurut Soejipto (1992) adalah : “Terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud”.

Selain itu dalam UU Republik Indonesia Nomor 52 disebutkan istilah ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu “kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Pada definisi tersebut kesejahteraan keluarga merupakan kondisi dimana adanya keuletan dan ketangguhan yang dimiliki keluarga untuk dapat mengembangkan diri dan keluarganya sehingga mampu hidup secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin.

2.5.2 Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Tingkatan kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera I (KSI) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 5 (lima) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 9 (sembilan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator *kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 5 (lima) indikator tahapan KS I dan 9 (sembilan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 7 (tujuh) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan (developmental needs) dari keluarga.

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 5 (lima) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) keluarga.

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 9 (sembilan) indikator KS II, 7 (tujuh) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

2.5.3 Indikator-Indikator Keluarga Sejahtera

Indikator-indikator keluarga sejahtera banyak dikeluarkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan keluarga sejahtera. Tentunya masing-masing indikator tersebut memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Berikut dijelaskan indikator indikator kesejahteraan keluarga yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

1. Indikator-Indikator Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN

BKKBN membagi lima tahapan kesejahteraan keluarga sejahtera, setiap tahapan kesejahteraan keluarga memiliki indikator indikator yang berbeda-beda (Sunarti, 2006). Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator, yaitu:

1. Anggota keluarga sudah melaksanakan ibadah menurut agamanya
2. Seluruh anggota keluarga dapat makan minimal dua kali sehari
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian
4. Bagian terluas dari lantai rumah adalah bukan tanah
5. Bila anak sakit, dibawa ke sarana kesehatan
6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agamanya secara teratur
7. Keluarga makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu
8. Setiap anggota keluarga memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun

9. Terpenuhiya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni
 10. Tidak ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir
 11. Ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap
 12. Tidak ada anggota keluarga berumur 10-60 tahun yang tidak bisa baca-tulis
 13. Tidak ada anak berumur 5-15 tahun yang tidak bersekolah
 14. Jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, memakai kontrasepsi
 15. keluarga dapat meningkatkan pengetahuan agamanya
 16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung
 17. Keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi
 18. Keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat; 19. keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan
 20. Keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah
 21. Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal
 22. Keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial
 23. Minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal.
2. Indikator-Indikator Keluarga Sejahtera Menurut BPS

Indikator kesejahteraan keluarga menurut BPS, didasarkan pada indikator untuk mengukur kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Garis Kemiskinan (GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan kata lain penduduk sejahtera adalah penduduk yang tidak miskin.

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, beh-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).
2. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan.

Selain indikator garis kemiskinan, BPS juga mengeluarkan empat belas indikator rumah tangga miskin. Dalam Isdijoso et al. (2016) disebutkan indikator-indikator rumah tangga miskin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m

2. Lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/ bambu/kayu murahan
3. Dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/ rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 50 0m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.6 Tinjauan Tentang PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)

2.6.1 Latar Belakang Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan kegiatan pengorganisasian dan pendampingan terhadap para perempuan kepala keluarga dan janda yang rentan atau miskin. PEKKA mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana Komnas Perempuan yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespon permintaan janda korban konflik Aceh untuk memperoleh akses sumber daya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka melalui sebuah proyek yang diberi nama "*windows project*". *Windows project* kemudian di transformasi menjadi Program Pemberdayaan Kepala Keluarga atau disebut PEKKA agar lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bukan dilihat dari status perkawinan semata. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu membuat perubahan sosial dan mengangkat martabat janda yang didalam masyarakat memiliki stigma negatif.

2.6.2 Kriteria Perempuan Kepala Keluarga

PEKKA mendeskripsikan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola

rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Yang termasuk kedalam kriteria perempuan kepala keluarga tersebut yaitu:

1. Perempuan yang bercerai
2. Perempuan yang ditinggal suaminya
3. Perempuan yang suaminya meninggal dunia
4. Perempuan yang tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga
5. Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga
6. Perempuan bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami.

2.6.3 Visi dan Misi PEKKA

PEKKA mempunyai visi pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam rangka ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat. Dalam mewujudkan visi tersebut PEKKA menciptakan misi yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan perempuan kepala keluarga.
2. Membuka akses perempuan kepala keluarga terhadap berbagai sumberdaya.

3. Membangun kesadaran kritis perempuan kepala keluarga baik terhadap kesetaraan peran, posisi, dan status mereka, maupun terhadap kehidupan sosial politiknya.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan kepala keluarga dalam berbagai proses kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya.
5. Meningkatkan kontrol perempuan terhadap proses pengambilan keputusan mulai ditingkat rumah tangga hingga negara.

2.6.4 Program Pemberdayaan Kepala Keluarga (PEKKA)

Program PEKKA yang diadaptasi Provinsi dari Seknas PEKKA yaitu program pemberdayaan ekonomi. Kegiatan dari program pemberdayaan ekonomi ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Menyimpan (menabung)

PEKKA mengajak anggota kelompok untuk menabung meskipun dengan nilai terendah yang mereka sanggupi. Kegiatan ini menjadi proses perubahan perilaku dan cara berfikir dari mengharapkan bantuan pihak lain menjadi bertumpu pada kemampuan sendiri. Selain itu, menabung juga melatih anggota untuk mengelola dana tunai atau sumberdaya keluarga dengan memperhitungkan masa depan. Menabung yang dilakukan dan dikelola secara kolektif membiasakan anggota untuk berdisiplin, jujur dan bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka.

2. Meminjam (kredit)

Anggota kelompok dapat meminjam uang dari kelompok, namun harus mematuhi kesepakatan yang dibuat dan jumlah pinjaman diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan actual dan kemampuan mengembalikan dalam jangka waktu yang disepakati.

3. Mengembangkan Kewirausahaan

Usaha yang dikembangkan sesuai potensi sumberdaya, kesempatan dan konteks. PEKKA membantu pengembangan usaha dengan bekerjasama dengan tempat-tempat penjualan oleh-oleh di dalam wilayah dan sampai keluar kota.

2.6.5 Landasan Hukum PEKKA

Landasan Hukum Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039)
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang perkembangan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan.